TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBUNGA

Analisis Materiil:

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya risiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 9

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) **Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

(4) **Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.**

c. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur spesifikasi dan/atau ketentuan teknis pada penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan metode

kartometrik.

Pasal 3

Metode kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan:

a. pembuatan peta kerja;
b. penarikan garis batas desa/kelurahan di atas peta kerja;
c. penentuan titik kartometrik;
d. digitisasi; dan
e. penyajian peta batas.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.
b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:
   - Pemerintah Daerah;
   - Pemerintah Desa; dan
   - Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu dibahas

- Segmentasi penetapan dan penegasan batas desa
- Tahapan penetapan batas desa/kelurahan

Pasal 10

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
b. pemilihan peta dasar; dan
c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 12

...

(4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des kabupaten/kota.

Pasal 14

...

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan PPB Des Kabupaten/Kota

6. Dimensi Harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;

c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;
f. Dimensi Asas Hukum;
g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;
i. Dimensi Hukum Adat;
j. Dimensi Teknik Penyusunan
   Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati *a quo* harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan.



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUDONGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puudongi di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puudongi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Commented [m1]: RANCANGAN

Commented [m2]: NOMOR ... TAHUN ...

Commented [m3]: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
UU 23 Tahun 2014
UU 7 Tahun 2025

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUDONGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Commented [m4]: Perlu penjelasan pemrakarsa terkait titik kartometrik dengan titik koordinat pada angka 9

Vide Pasal 1 angka 18 PerBIG 15 Tahun 2019
"Titik kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat".

Commented [m5]: dihapus

Commented [m6]: diakhiri tanda baca titik

Commented [m7]: Bujur Timur seharusnya angka 11

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puudongi mempunyai luas wilayah sebesar 1,004 Ha (seribu empat hektare)
(2) Desa Puudongi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Polinggona;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Plasma Jaya dan Desa Tanggeau;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peoho; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pondouwae.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat 4° 27' 29.842" LS dan 121° 35' 58.938" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puudongi dan Desa Plasma Jaya, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-001 dengan koordinat 4° 27' 26.390" LS dan 121° 35' 48.173" BT yang terletak pada Kebun.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-002 dengan koordinat 4° 27' 22.921" LS dan 121° 35' 50.614" BT yang terletak pada Kebun.
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-003 dengan koordinat 4° 27' 20.159" LS dan 121° 35' 41.620" BT yang terletak pada Kebun.
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-004 dengan koordinat 4° 27' 22.701" LS dan 121° 35' 40.274" BT yang terletak pada Kebun.
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-005 dengan koordinat 4° 27' 20.930" LS dan 121° 35' 26.972" BT yang terletak pada Kebun.
   g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-006 dengan koordinat 4° 27' 12.428" LS dan 121° 34' 34.622" BT yang terletak pada Kebun.
   h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-007 dengan koordinat 4° 27' 20.105" LS dan 121° 34' 21.721" BT yang terletak pada kebun.
   i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-

Commented [m8]: (seribu empat)

Commented [m9]: ?

Commented [m10]: Batas Desa Puudongi Kecamatan polinggona dengan Kelurahan Polinggona Kecamatan polinggona yaitu:

Commented [m11]: Tabulasi diawali dengan huruf kecil

Commented [m12]: Huruf kapitil

Commented [m13]: idem

008 dengan koordinat 4° 27' 13.145" LS dan 121° 34' 17.374" BT yang terletak pada Pematang.

j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-009 dengan koordinat 4° 27' 22.018" LS dan 121° 34' 12.300" BT yang terletak pada Kebun.

k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi dan Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

(2) Batas antara Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat 4° 27' 29.842" LS dan 121° 35' 58.938" BT yang merupakan Kebun.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000 dengan koordinat 4° 27' 38.951" LS dan 121° 36' 12.401" BT yang terletak pada Kebun.

(3) Batas antara Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000 dengan koordinat 4° 27' 38.951" LS dan 121° 36' 12.401" BT yang merupakan Kebun.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-001 dengan koordinat 4° 28' 8.994" LS dan 121° 36' 10.161" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-002 dengan koordinat 4° 28' 44.373" LS dan 121° 35' 35.893" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-003 dengan koordinat 4° 28' 57.596" LS dan 121° 35' 35.333" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang terletak pada Kebun.

(4) Batas antara Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan Hutan

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang terletak pada Hutan

Commented [m14]: perlu penjelasan pemrakarsa mengenai segmentasi

(5) Batas antara Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang merupakan Hutan.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2006-001 dengan koordinat 4° 28' 33.307" LS dan 121° 33' 40.450" BT yang terletak pada As Jalan.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang terletak pada Hutan.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Commented [m15]: TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa/Kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Puudongi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [m16]: Sesuai standar

1:5000. 1:7000. 1:7.500

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puudongi secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Puudongi dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yanga mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [m17]: yang

Commented [m18]: pada

Commented [m19]: dimaksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [m20]: ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [m21]: ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Commented [m22]: TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUDONGI

Commented [m23]: Rata kiri di pojok kanan

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
2	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000	344635.1775	9507067.498
3	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000	343285.1164	9504627.122
4	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000	340557.4018	9504984.798
5	TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000	345050.7233	9506788.496
6	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
7	TK.74.01.25.2002-25.2002-001	340369.9401	9505109.977
8	TK.74.01.25.2002-25.2004-001	344983.4325	9505865.623
9	TK.74.01.25.2002-25.2004-003	343912.6947	9504370.821
10	TK.74.01.25.2002-25.2004-002	343929.1669	9504776.988
11	TK 74.01.25.1001-25.2002-001	344303.13	9507172.86
12	TK 74.01.25.1001-25.2002-002	344378.18	9507279.56
13	TK 74.01.25.1001-25.2002-003	344100.76	9507363.88
14	TK 74.01.25.1001-25.2002-004	344059.44	9507285.71
15	TK 74.01.25.1001-25.2002-005	343649.27	9507339.34
16	TK 74.01.25.1001-25.2002-006	342035.01	9507597.37
17	TK 74.01.25.1001-25.2002-007	341637.78	9507360.8
18	TK 74.01.25.1001-25.2002-008	341503.35	9507574.31
19	TK 74.01.25.1001-25.2002-009	341347.48	9507301.48